

Prostitusi, Petaka Moral dan Tanggungjawab Media

Oleh Gatut Priyowidodo, Ph.D

Kota abad 17 SM yakni Timna, cukup dikenal dalam kisah Perjanjian Lama. Di sinilah para lelaki yang tidak tahan mengendalikan libidonya pergi melampiaskan hawa nafsunya. Satu di antara pengunjung itu adalah Yehuda. Ia ingin sekali membeli kenikmatan non bendawi di sana. Namun, Tamar seorang perempuan cantik yang kebetulan adalah anak menantunya terlebih dulu pergi ke sana dan menyamar sebagai seorang PSK (Pekerja Seks Komersial). Niatnya bukan karena ia ingin memperoleh bayaran, tetapi semata ia ingin keturunan dari Yehuda yang masih trah Yakub atau Bani Israel. Kolaborasi incest pun terjadi. Petaka moral mulai tertoreh dimuka bumi mula-mula. Sungguh miris, membayangkan pada era seperti itu prostitusi sudah jamak. Itu artinya, sejarah praktik jual-beli perempuan sudah amat lama.

Kini era telah melompat jauh ke depan memasuki era abad 21 M. Namun, meski fakta historis telah merekam perjalanan kelam sebuah peradaban yang menerjang nilai-nilai etik, moral dan teologis, tetap saja sebagian dari umat manusia ini menyukai dan mencarinya. Bahkan tidak tanggung-tanggung, sebagian negara di dunia ini melegalkan praktik pelacuran adalah sah secara konstitusi. Bahkan di Indonesia menurut Lamidjo (2011) praktik-praktik prostitusi sudah ada sejak masa awal penjajahan Belanda, dikarenakan jumlah perempuan Eropa dan Cina di Batavia lebih sedikit dibandingkan jumlah prianya saat itu. Bahkan, sejak masa J.P. Coen pun telah berkembang praktik-praktik prostitusi walaupun secara tegas ia tidak setuju dengan praktik-praktik semacam itu. J.P. Coen sendiri bahkan pernah menghukum putri angkatnya, Sarah, yang ketahuan “bermesraan” dengan perwira VOC di kediamannya. Sang perwira itu dihukum pancung, sedangkan Sarah didera dengan badan setengah telanjang. Walaupun Coen secara tegas menolak prostitusi, kenyataannya ia dan pengganti-penggantinya kemudian tidak mampu membendung berkembangnya prostitusi dan prostitusi merupakan masalah klasik yang dihadapi Batavia seiring dengan perkembangan kota ini. Perkembangan prostitusi pertama di Jakarta terkonsentrasi di kawasan Macao Po (Jakarta Kota) pada abad XVII.

Ketika depresi ekonomi terjadi tahun 1930-an, bisnis prostitusi di Bataviapun tetap menggeliat. PSK tidak saja perempuan-perempuan Cina yang didatangkan oleh gerombolan Cina, tetapi juga orang Jepang, Rusia, Indo dan Indonesia. Mereka tidak hanya dikonsumsi para tentara dan pedagang tetapi juga buruh kasar. Tarifnya f1 untuk pelacur pribumi dan f 2,50-37 untuk rate pelacur Cina. Sistem politik dan pemerintahan boleh berubah dari Hindia Belanda, Jepang, era

kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi, ternyata praktik jual-beli PSK ini tetap eksis.

Tahun 1999, Gubernur Sutiyoso memang telah berhasil menutup lokalisasi Kramat Tunggak dan disulap menjadi *Jakarta Islamic Center*, alih-alih persoalan itu selesai, ternyata implikasinya kemana-mana. Dinas Kesehatan tidak lagi direcoki urusan pemeriksaan rutin, tetapi akibatnya adalah kemana saja mereka berpraktik secara partikelir, tidak ada yang mengkoordinasi. Bahkan bila mereka sebagian adalah penderita HIV/AIDS, kemudian tanpa sadar menyebarkan kepada konsumennya, siapa yang tahu?

Pengaruh dan Tanggungjawab Media

Secara parsial keberanian beberapa Kepala Daerah menutup lokalisasi patut diapresiasi. Seperti Gubernur Sutiyoso (Kramat Tunggak, 1999), Bupati Lamongan HR Muh Faried (1989-2000) yang menutup lokalisasi Nguwok tahun 1993 dan terakhir Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang menutup Dolly yang konon lokalisasi terbesar se Asia Tenggara pada 19 Juni 2014. Namun, pada saat yang sama mereka juga tahu dan sadar bahwa dampak ikutan kebijakan tersebut akan sangat sulit dideteksi.

Mungkin ketika Kramat Tunggak dan Nguwok ditutup pada tahun 1990-an, mereka segera pindah area operasi secara konvensional. Tetapi ketika Dolly ditutup yang patut dicermati, mungkin secara fisik, mereka sudah tidak duduk-duduk di etalase showroom, namun telah mengeser format marketingnya menjadi prostitusi online. Era daring dengan ditandai kemajuan teknologi informasi melalui internet semakin memudahkan proses transaksi esek-esek virtual dilakukan. Aneka gawai dalam satu gengaman memungkinkan siapapun bisa melakukan eksekusi dengan mudah.

Tamam ketika melakukan transaksi dengan Yehuda bermanuver segala rupa, karena takut ketahuan. Tetapi sekarang, dengan sekali klik, beraneka rupa pilihan terpampang di depan layar dengan tanpa penyamaran. Keberanian para penjaja kenikmatan online, sungguh tidak diragukan. Pilihan tersedia beraneka rupa kriteria. Berdasarkan usia, status (pelajar, mahasiswa atau pekerja kantoran), *rate* harga (ratusan ribu, jutaan, belasan/puluhan juta rupiah) semua *ready stock*.

Sepertinya fakta-fakta sosial menyempang dengan perkembangan teknologi inilah yang menjadi keprihatinan Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta di era digital ini. Ketika para pekerja seks profesional ini tidak lagi bisa dikendalikan, maka sasaran tembak mereka bisa ke semua arah. Terlebih berdasarkan data Kemenkes RI (2014) jumlah kumulatif dan tingkat prevalensi HIV/AIDS DKI Jakarta bertengger, pada urutan tiga besar setelah Papua dan Jawa Timur, maka jika tidak dilakukan langkah-langkah sporadis jelas dampaknya akan semakin massiv.

Ide legalisasi prostitusi di DKI memang serba dilematis. Di satu sisi, pemerintahan sebelumnya sudah berusaha keras menutup lokalisasi dan menggantinya dengan pendirian JIC setelah melakukan studi komparasi ke Mesir, Iran, Inggris dan Perancis (2002), tetapi 13 tahun kemudian akan ada peninjauan kembali. Tentu kebijakan ini kalau benar-benar dilaksanakan akan memunculkan prokon yang semakin seru. Namun di sisi lain, jika gagasan ini tidak direalisasi praktik-praktik prostitusi virtual dengan beragam penawaran juga tidak terbandung lagi. Pemerintah DKI meskipun memiliki otoritas yang cukup kuat untuk melakukan pengaturan pasti akan sangat kesulitan di lapangan, karena keterbatasan kemampuan akses informasi kepada mereka yang membuka lapak-lapak virtual tersebut. Tentu lain halnya, jika mereka terkonsentrasi pada wilayah tertentu seperti di Kepulauan Seribu sehingga monitoring dan pemeriksaan kesehatan mudah secara rutin akan dilakukan.

Jujur harus diakui meski secara asumsi, bahwa maraknya bisnis prostitusi online ini tidak lepas dari gencarnya kekuatan terpaan media (*media exposure*) yang hampir setiap waktu mengelaborasi fenomena ini tanpa kenal lelah. Ruang-ruang domestik keluarga, yang semestinya menjadi ranah privat untuk bercerngkerama bersama anggota keluarga juga berhasil dijebol bahkan tanpa sadar menjadi menu perbincangan yang menarik untuk tema diskusi.

Lalu, siapa yang patut disalahkan atau yang bertanggungjawab? Media sebagai instrumen informasi sejatinya juga sudah sangat hati-hati melakukan penyiaran berita kepada publik. Tetapi tetap saja, mereka kerap kedodoran ketika bicara tentang STP (segmentasi, targeting dan positioning khalayak pemirsa). Ketika sebuah berita taruhlah tentang prostitusi atau kriminalitas, yang semestinya untuk segmen pasar dewasa, namun disitu juga ada anak-anak, tentu situasi ini serba merepotkan. Di sinilah, lagi-lagi peran keluarga terutama orang tua agar menjadi benteng iman bagi seluruh penghuni rumah dan menghindarkan petaka moral untuk generasi masa depan.

***Gatut Priowidodo, Ph.D Ketua PKKP (Pusat Kajian Komunikasi Petra) dan Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi UK Petra Surabaya**